

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Indriya Indriya, Helina Amara, Haifa Nusaibah, Intan Nurmala

Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia
indriya@uika-ac.id, helinaamara08@gmail.com, haifaanusaibah@gmail.com,
intannr1309@gmail.com,

ABSTRACT

Sustainable Development Goals or commonly abbreviated SDGs are sustainable development goals resulting from the UN Summit in 2012. One of the 17 resulting goals is regarding quality education. To support quality education in all countries, an educational policy is certainly needed. Indonesia has shown that there are education policies issued to support quality education SDGs. In Indonesia the policy is to improve quality, accessibility, supporting facilities, and educational services, as well as strengthening the development of character education. In Islamic religious education character is an aspect that is highly emphasized to achieve Islamic goals and this is to support quality education in accordance with the SDGs. So the purpose of this research is to find out Islamic religious education policies that support the SDGs of quality education in Indonesia and provide solutions to the above policies. The method used is library research by taking references from books, websites, local journals and international journals.

Keywords: *Policy, Islamic Religious Education, Character, SDGs*

ABSTRAK

Sustainable Development Goals atau yang biasa disingkat SDGs merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan dari KTT PBB pada tahun 2012. Salah satu dari 17 tujuan yang dihasilkan yaitu mengenai pendidikan berkualitas. Untuk mendukung pendidikan berkualitas di semua negara tentu diperlukan sebuah kebijakan pendidikan. Indonesia telah menunjukkan adanya kebijakan pendidikan yang diterbitkan untuk mendukung SDGs pendidikan berkualitas. Di Indonesia kebijakannya untuk peningkatan kualitas, aksesibilitas, sarana pendukung, dan pelayanan pendidikan, serta memperkuat pengembangan pendidikan karakter. Dalam pendidikan agama Islam, karakter merupakan aspek yang sangat ditekankan untuk mencapai tujuan Islam, dan hal tersebut untuk menunjang pendidikan berkualitas sesuai dengan SDGs. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pendidikan agama Islam yang mendukung SDGs pendidikan yang berkualitas di Indonesia, serta memberikan solusi terhadap kebijakan diatas. Metode yang digunakan yaitu library research (penelitian pustaka) dengan mengambil referensi dari buku, website, jurnal lokal dan jurnal internasional.

Kata Kunci: *Kebijakan, Pendidikan Agama Islam, Karakter, SDGs*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan diartikan sebagai perbuatan (baik hal, cara, dan sebagainya) juga bermakna pengetahuan tentang mendidik, pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, bathin dan sebagainya (W.J.S.Poerwadaminta, 2007). Pendidikan serumpun dengan kata mengajar yang berarti memberi pengetahuan atau pelajaran (W.J.S.Poerwadaminta, 2007). Kata pendidikan selanjutnya sering digunakan untuk menterjemahkan kata education atau teaching dalam bahasa Inggris. Education menunjukkan suatu kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pembinaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain (Abudin Nata, 2005). Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai: “Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinyamasyarakat, bangsa dan Negara (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2003). Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia di seluruh dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2003).

Pendidikan merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam memberikan, menanamkan serta menumbuhkan nilai-nilai potensial yang ada pada diri peserta didik sehingga memiliki kecerdasan, keterampilan, dan akhlak yang mulia. Pendidikan dapat dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan pendidikan oleh diri sendiri, kegiatan pendidikan oleh lingkungan, dan kegiatan pendidikan oleh orang lain. Pendidikan juga mencakup tiga binaan yang mencakup daerah jasmani, daerah akal, dan daerah hati. Dan pendidikan ada tiga yang pokok tempat yang mencakup di dalam rumah tangga, di masyarakat, dan di sekolah (Indriya, n.d.). Karena itu, pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi diri peserta didik untuk memiliki kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri dan juga untuk masyarakat melalui proses pembelajaran berpendapat bahwa pendidikan lebih dari sekedar memperoleh pengetahuan atau meningkatkan kapasitas kognitif untuk mengembangkan seluruh pribadi, termasuk emosi, motivasi, kemauan, kerohanian, dan sosialitas. Pendidikan dapat berkontribusi pada makna hidup dengan meningkatkan kondisi kehidupan orang (materi), sehingga memfasilitasi untuk menemui makna dalam kehidupan. Dalam penerapan pendidikan di kehidupan, tentu dibutuhkan suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dan kebijakan tersebut dinamakan kebijakan Pendidikan (Abd Qadir Muslim; Gede Sedana Suci; Muhammad Rizki, 2021).

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu agenda bagi pemerintah di seluruh dunia. Kebijakan pendidikan adalah suatu kumpulan hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang pelaksanaan sistem pendidikan yang dijalankan dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai sebuah perencanaan untuk memandu pengambilan keputusan agar tujuan dari pendidikan yang diinginkan dapat terwujud. Kebijakan pendidikan memiliki dua fungsi diantaranya yaitu sebagai penyedia akuntabilitas atau kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap norma budaya yang menurut pemerintah perlu diadakan dalam pendidikan, serta melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru. Definisi kebijakan pendidikan adalah program yang

dikembangkan oleh otoritas publik, diinformasikan oleh nilai-nilai dan ide-ide, diarahkan ke aktor-aktor pendidikan dan dilaksanakan oleh administrator dan profesional (Abd Qadir Muslim; Gede Sedana Suci; Muhammad Rizki, 2021).

Permasalahan kebijakan pendidikan negara berkembang seperti Indonesia masih menjadi hambatan seperti keadilan, kualitas keseluruhan hasil pembelajaran dan lingkungan sekolah dan pembelajaran, atau kapasitas sistem untuk mempersiapkan siswa untuk masa depannya, pendanaan, tata kelola yang tidak efektif atau mekanisme evaluasi dan penilaian. Seharusnya Kebijakan pendidikan dapat merujuk pada program yang memengaruhi sistem pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tersier. Menurut (Jie, 2016) kebijakan pendidikan memiliki kerangka yang berfokus pada konten, konteks, proses, dan aktor. Aktor merupakan individu atau anggota kelompok atau organisasi yang dipengaruhi oleh konteks di mana mereka tinggal dan bekerja. Konteks dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ketidakstabilan atau ideologi, oleh sejarah dan budaya. Proses dipengaruhi oleh posisi aktor dalam struktur kekuasaan, nilai-nilai dan harapan aktor. Dalam perumusan kebijakan pendidikan yang diterbitkan tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai macam instrumen. Pemerintah harus memilih dan memilih mana instrumen yang sesuai untuk kebijakan pendidikan yang akan diterapkan. Namun, akhir-akhir ini dunia tengah diperkenalkan dengan suatu pengetahuan baru yang bernama *Sustainable Development Goals* (Abrista Devi; Indriya, 2022).

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan adalah *library research*. Dengan metode analisis dokumen dilakukan dengan teknik kompilasi dan manipulasi statistik, referensi dan panduan abstrak, serta analisis konten (William, 2007). Penelitian ini berupaya mendeskripsikan kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia mendukung SDGs. Metode ini merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian. Penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, tehnik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif. Sedangkan untuk pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data penelitian, yaitu observasi, dan studi dokumentasi. kemudian data tersebut direduksi, didisplay dan disajikan sesuai dengan prosedur penelitian (Sugiyono, 2015).

C. KAJIAN LITERATURE

1. Kebijakan

Menurut Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan". Menurut LAN RI (LAN, 2010:5), formulasi kebijakan merupakan kegiatan pengembangan rencana dan metode (alternatif kebijakan) untuk menyelesaikan masalah publik yang telah disepakati dalam suatu agenda pemerintah dan diakhiri dengan suatu kegiatan pemilihan terhadap alternatif yang dianggap terbaik (pembuatan keputusan) untuk menyelesaikan masalah publik tersebut. Menurut James Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Formulasi kebijakan adalah bagaimana pengembangan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah publik serta siapa saja yang berpartisipasi di dalamnya (Achmad Nur Fauzi, n.d.).

2. Pendidikan Agama Islam

Menurut Ibn Khaldun di dalam buku *Mukadimmah* yang merupakan karya magnum opusnya, mempunyai pengertian yang cukup luas. Dimana menurut pendapatnya, pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar mengajar yang dibatasi oleh empat dinding, tetapi pendidikan adalah suatu proses, dimana manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman (Tafsir, 2013).

Pengertian Pendidikan Islam menurut Ahmad Tafsir berpendapat bahwa, pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam, terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-quran dan Al-sunnah/hadits (Tafsir, 2013).

Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan merupakan proses mengasah potensi yang ada pada diri siswa. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di muka bumi. Semua anak memiliki sifat lahir dan batinnya masing-masing, oleh karena itu anak disini berperan sebagai makhluk yang perlu dididik agar memiliki kekuatan untuk tumbuh dan berkembang serta memperbaiki tingkah lakunya ke arah yang lebih baik (Sholichah, 2018).

Menurut Zakiah Daradjat, pendidikan agama Islam adalah suatu upaya berupa bimbingan dan pengasuhan kepada peserta didik agar kelak setelah menyelesaikan pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pedoman hidup (Sritama, 2019).

Dari berbagai pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang dapat menanamkan sifat dan perilaku yang baik pada diri siswa/peserta didik yang dituntut oleh guru/pendidik dalam mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kodrat yang diberikan Tuhan. Sehingga dapat mencapai cita-cita menjadi orang yang beriman dan bertakwa yang memberikan kebaikan bagi sesama (Indriya, 2019).

3. Pendidikan Karakter

Karakter pendidikan yang telah dilakukan saat ini nampaknya masih belum mampu menunjukkan keberhasilannya dalam meningkatkan karakter bangsa. Meskipun masih terlalu dini untuk menilai keberhasilan ide baru, dengan melihat berbagai kasus degradasi moral yang akhir-akhir ini meningkat oleh siswa, hal ini memperkuat bahwa pendidikan karakter masih membutuhkan perhatian dan perbaikan. Dengan ini, pemerintah seharusnya memberikan ruang bagi pengamat pendidikan untuk berkontribusi pemikiran mereka dan menambal kesenjangan yang masih kurang dari pendidikan karakter. Dengan meminjam konsep Pendidikan Islam dari Syed Muhammad Naquib Al-Attas, yang berdasarkan Ta'dib, Adian Husaini mengatur bahwa Islam adalah prinsip utama dalam pendidikan dan karakter Islam (Husaini, Adian, 2018).

Karakter pada umumnya dihubungkan dengan watak, akhlak atau budi pekerti yang dimiliki seseorang. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1. Implementasi Pendidikan Karakter 39 sebagai jati diri atau karakteristik kepribadiannya yang membedakan seseorang dari orang lain. Dengan kata lain, karakter merupakan kebiasaan baik seseorang sebagai cerminan dari jati dirinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hill bahwa, "*Character determines someone's private thoughts and someone's action done. Good character is the inward motivation to what is right, according to the highest standard of behavior in every situation*" (Mustoip et al., 2018). Karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan

lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. Dari konsep karakter ini muncul konsep pendidikan karakter (*character education*). Karakter yang baik harus dibangun, sedangkan membangun karakter yang baik membutuhkan sarana yang salah satunya adalah jalur pendidikan yaitu sekolah. Namun, karena pendidikan saat ini menerapkan pembelajaran daring, maka dibutuhkannya lingkungan yang terdekat dengan anak yaitu keluarga (Afrilia, Hilda; Indriya, 2020).

4. SDGs

Konsep SDGs (*Sustainable Development Goals*) berasal dari definisi yang diberikan oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland dalam laporan “*Our Common Future*” pada tahun 1987 yang mengungkapkan masalah pertumbuhan masyarakat tentang keterbatasan sumber daya dan distribusinya. Berbagai inisiatif telah diambil untuk masalah itu contohnya yaitu dalam KTT Rio 1992 dan KTT Millenium 2000 dan masih belum terpecahkan. Namun pada KTT PBB 2012 yang dilaksanakan di Rio tentang *Sustainable Development Goals*, PBB mengambil inisiatif merumuskan 17 tujuan SDGs yang disetujui pada tahun 2015 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2016 dengan tujuan untuk mencapainya dalam lima belas tahun. Peta jalan ini dikenal sebagai Agenda 2030 yang mencakup 128 tujuan “rencana aksi untuk manusia, planet dan kemakmuran juga berupaya memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang lebih besar (Alvares-Otero, J., & de Lazaro y Torres, 2018).

Tujuh belas tujuan global dari SDGs diantaranya : 1) mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana; 2) mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan; 3) memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia; 4) memastikan inklusif dan pendidikan berkualitas yang adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; 6) memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 7) memastikan akses terjangkau, andal, energi berkelanjutan dan modern untuk semua; 8) mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, pekerjaan penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua; 10) mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara; 11) menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan; 12) pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; 13) mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14) melestarikan dan menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan; 15) melindungi, memulihkan, dan mempromosikan keberlanjutan penggunaan ekosistem terestrial, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; 16) mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua tingkatan; dan yang terakhir yaitu 17) memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global (Boeren, 2019).



Gambar 1. Ruang Lingkup SDGs Sumber: United Nations (2021)

Gambar tersebut menunjukkan konsep SDGs terdapat poin yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu di poin ke empat tentang “pendidikan berkualitas”. Poin tersebut perlu kita jadikan perhatian khusus dalam mengembangkan kebijakan pendidikan di suatu negara karena konsep SDGs merupakan konsep yang mendunia. Alangkah lebih baiknya jika suatu kebijakan pendidikan didasarkan pada poin tersebut. Maka dari itu tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pendidikan yang mendukung konsep *Sustainable Development Goals* pendidikan berkualitas dari beberapa negara, khususnya negara berkembang (Abd Qadir Muslim; Gede Sedana Suci; Muhammad Rizki, 2021).

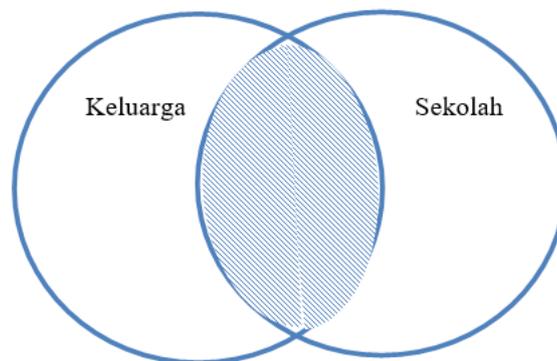
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber utama penentuan karakter dalam Islam, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam lainnya, adalah al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber pokok tersebut yaitu al-Quran dan sunnah, diakui oleh semua umat Islam sebagai dalil naqli yang tidak diragukan otoritasnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nahl: 78 bahwa manusia lahir ke dunia dengan tidak mengetahui apapun, tetapi manusia diberi bekal penglihatan, pendengaran, dan hati agar manusia bersyukur. Ayat ini menjelaskan tentang penciptaan manusia pertama kali yang tidak mengetahui apapun, kemudian Allah Swt. memberikan kepada manusia potensi pembelajaran melalui kemampuan fisik yakni pendengaran dan juga penglihatan serta memberikan juga kepada manusia kemampuan psikis, yakni akal. Semua kemampuan tersebut harus dikembangkan dan dibina melalui pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan ajaran Islam (Charifudin, 2016).

Salah satu pendidikan yang penting untuk diajarkan orangtua kepada anak ialah pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada dasarnya adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membangun karakter dari anak didik. Pendidikan dilakukan tidak hanya untuk memberikan anak ilmu pengetahuan tetapi juga untuk menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat agar peserta didik bisa tumbuh dengan memahami nilai dan norma tersebut dan bisa membaur dalam kehidupan bermasyarakat (Hafidhuddin, 2016).

Dalam pandangan Islam karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah Swt, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat (Hafidhuddin, 2016). Dalam al-Quran ditemukan banyak sekali pokok-pokok keutamaan karakter yang dapat digunakan untuk membedakan perilaku seorang Muslim, seperti perintah berbuat kebaikan (ihسان) dan kebajikan (al-birr), menepati janji (al-wafa), sabar, jujur, takut pada Allah

Swi., bersedekah di jalan Allah, berbuat adil, dan pemaaf (QS. al-Qashash [28]: 77; QS. al-Baqarah [2]: 177; QS. al-Muminun (23): 1–11; QS. al-Nur [24]: 37; QS. al-Furqan [25]: 35–37; QS. al-Fath [48]: 39; dan QS. Ali ‘Imran [3]: 134. Ayat-ayat ini merupakan ketentuan yang mewajibkan pada setiap Muslim melaksanakan nilai karakter mulia dalam berbagai aktivitasnya. Keharusan menjunjung tinggi karakter mulia (akhlak karimah) lebih dipertegas lagi oleh Nabi saw. dengan pernyataan yang menghubungkan akhlak dengan kualitas kemauan, bobot amal, dan jaminan masuk surga. Dalam pandangan Islam anak merupakan amanah di tangan kedua orang tuanya. Hatinya yang bersih merupakan permata yang berharga, lugu dan bebas dari segala macam ukiran dan gambaran. Ukiran berupa didikan yang baik akan tumbuh subur pada diri anak, sehingga ia akan berkembang dengan baik dan sesuai ajaran Islam, dan pada akhirnya akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika anak sejak dini dibisakan dan dididik dengan hal-hal yang baik dan diajarkan kebaikan kepadanya, ia akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan akan memperoleh kebahagiaan serta terhindar dari kesengaraan/siksa baik dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak (Rusmana, 2012). Irisan gambar di bawah ini, merupakan penggambaran faktor apa saja, yang diperlukan dalam pembentukan karakter Islami pada anak selain faktor sekolah dan guru. Dalam hal ini artinya ada faktor lain dalam pembentukan karakter Islami anak selain keluarga, guru dan sekolah, diantaranya lingkungan, agama Islam, tingkat pendidikan orang tua, ekonomi keluarga, spiritual intelligence yang kesemua faktor ini akan membentuk terhadap karakter anak itu sendiri (Khaldun, 2001).



Gambar 1. Pembentukan Karakter Islami Anak

Agenda PBB 2030 didasarkan pada perjanjian HAM internasional yang sudah lama ada, dan SDGs pendidikan berkualitas secara khusus didasarkan pada Konvensi Hak-Hak Anak (CRC; PBB, 1989) (Lestari, 2016). CRC menetapkan bahwa pendidikan yang berkualitas harus fokus pada (a) pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anak hingga potensi penuh mereka; (b) pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dan untuk prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB; (c) perkembangan rasa hormat kepada orang tua anak, identitas budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilai, untuk nilai-nilai nasional negara di mana anak itu tinggal, negara dari mana ia berasal, dan untuk peradaban berbeda dengan miliknya sendiri; (d) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dalam semangat pemahaman, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan di antara semua orang, kelompok etnis, nasional dan agama dan orang-orang asli; dan (e) pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan alam (Nolet, 2017). Ada kelemahan dimana kualitas pendidikan yang diterima anak-anak sangat

bervariasi di seluruh dunia, bergantung langsung pada berbagai faktor, termasuk jenis kelamin, ras, usia, status sosial ekonomi, identitas seksual, dan tentu saja di mana seseorang tinggal. Anak-anak di negara-negara yang sebelumnya terjajah dan kurang berkembang di daerah selatan cenderung memiliki sedikit akses ke pendidikan berkualitas dibandingkan dengan anak-anak di negara-negara kaya dan maju di daerah utara. Hampir 40% anak-anak di dunia menerima pendidikan yang tidak memadai untuk mempelajari keterampilan membaca dan matematika dasar. Pada 2013 (tahun terakhir yang datanya tersedia), 59 juta anak usia sekolah dasar tidak bersekolah di seluruh dunia. Di seluruh dunia, anak perempuan cenderung putus sekolah dengan tingkat yang lebih tinggi daripada anak laki-laki. Dua pertiga dari 757 juta orang dewasa di seluruh dunia yang tidak dapat membaca dan menulis adalah Wanita. Di semua negara memiliki kesenjangan ras/etnis yang signifikan, contohnya tingkat kelulusan untuk siswa berkulit hitam, hispanik, amerika indian, dan asli alaska lulus pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada siswa kulit putih.



Gambar 2. Pendidikan dalam SDGs United Nations (2021)

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan yang muncul di setiap tujuan, setiap tujuan dari SDGs memiliki kerangka kerja indikator global tersendiri. Untuk tujuan keempat yaitu pendidikan berkualitas, memiliki kerangka kerja indikator global yang dikembangkan oleh *Inter-Agency* dan kelompok ahli yang disetujui pada sesi ke-47 Komisi Statistik PBB yang diadakan pada Maret 2016. Dalam memahami pendidikan berkualitas (Boeren, 2019) memiliki pendapat bahwa terdapat tiga perspektif yang bisa digunakan yaitu perspektif mikro, meso, dan makro. Orang tua, anak-anak, remaja dan pelajar dewasa adalah aktor kunci di tingkat mikro karena merekalah yang muncul dalam statistik partisipasi, mereka adalah aktor yang paling relevan dalam wacana kebijakan yang didukung oleh tolok ukur dan indikator, dan mereka diharapkan memperoleh tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi untuk beroperasi dalam ekonomi global. Namun, tidak semua orang memiliki peluang yang sama dalam hidup untuk sukses dalam pendidikan, penelitian telah menunjukkan bahwa ada perbedaan besar tergantung pada karakteristik sosial-ekonomi dan sosial-demografi keluarga. Sehingga, perspektif mikro biasanya merujuk pada faktor sosio-demografis dan sosial ekonomi, sikap, kepercayaan diri, minat, dan motivasi orang untuk belajar. Proses pembelajaran dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk sekolah, perguruan tinggi, dan tempat kerja. Ketersediaan pembelajaran yang berkualitas tinggi sangat penting untuk hasil pendidikan yang baik, seperti yang di sampaikan Vygotsky (Indriya, 2022) . Karena hal tersebut tentu diperlukan guru, pendidik, manajer, dan staf pendukung berkualitas tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan peserta

didik dan untuk mengembangkan profesional mereka sendiri di dalam lembaga Pendidikan(Nata, 2003). Lembaga pendidikan tersebutlah yang merupakan alat tingkat meso untuk menerjemahkan kebijakan pendidikan ke dalam proses pembelajaran. Tanpa interaksi antara tingkat mikro dan makro tidak mungkin pembelajaran berkualitas tinggi akan terjadi. Terdapat tiga komponen yang mencirikan perspektif makro yaitu struktur penawaran yang tersedia di institusi; cara-cara di mana pembelajaran dan praktik pedagogis diorganisasikan; dan tingkat kualifikasi anggota staf (Boeren, 2019). Terlepas dari pentingnya tingkat makro, kegiatan di sekolah juga perlu berkaitan dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan karena setiap negara memiliki kebijakan pendidikan sendiri-sendiri yang harus diikuti. Contohnya termasuk kebutuhan untuk mengikuti serangkaian persyaratan untuk memberikan kualifikasi standar dan diakui secara resmi, atau untuk menerima pendanaan Dengan demikian, interaksi antara tingkat mikro dan makro juga penting. Singkatnya, faktor-faktor tingkat makro cenderung berhubungan dengan aturan dan peraturan hukum dan keuangan, sistem pendidikan menyeluruh yang berlaku di suatu negara atau wilayah yang mengalami devolusi, dan ideologi sosial-politik dari negara atau wilayah tersebut karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para sarjana menunjukkan bahwa negara dengan tingkat demokrasi, kepercayaan politik, dan keadilan sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang lebih kuat.

Ada pendekatan yang dapat digunakan guru di tingkat kelas dan sekolah untuk memberlakukan visi pendidikan berkualitas menurut Nolet (Boeren, 201 yaitu : 1) melaksanakan praktik-praktik pendidikan yang responsif secara budaya; dan 2) membantu siswa mengembangkan pandangan dunia yang berkelanjutan tentang pendidikan. Ada banyak literatur yang menggambarkan praktik-praktik yang responsif secara budaya. Pendidikan yang responsif secara budaya mengidentifikasi dan memelihara kekuatan budaya yang unik pada setiap siswa. Ini melibatkan berbagai strategi dan pendekatan yang menghubungkan pengetahuan budaya siswa, pengalaman sebelumnya, dan gaya pribadi dengan pengetahuan akademik. Pendidikan yang responsif secara budaya melegitimasi apa yang sudah diketahui siswa dan mempromosikan prestasi siswa serta rasa kesejahteraan tentang tempat budaya di dunia (Nata, 2003). Pandangan dunia adalah kombinasi unik dari perspektif, nilai, pengetahuan, dan kepercayaan yang menentukan cara seseorang melihat, menafsirkan, dan berinteraksi dengan dunia. Pandangan dunia yang berkelanjutan tentang pendidikan mendukung pelajar untuk mempersiapkan mereka untuk terlibat secara efektif dengan kompleksitas, ketegangan, dan ketidakpastian yang terkait dengan menciptakan ruang yang aman dan adil bagi manusia dan spesies lain saat ini dan masa depan. Penerapan pandangan dunia dapat dilihat pada hal-hal yang dikatakan, pilihan yang dibuat, dan cara berperilaku sehari-hari dari menit ke menit. Ketika dua pendekatan ini dikombinasikan, mereka dapat membantu guru menciptakan lingkungan kelas di mana semua memiliki kesempatan untuk menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sebelumnya, pengetahuan budaya, dan gaya kinerja.

Berikut ini terdapat beberapa strategi pengajaran khususnya juga di PAI Pendidikan Agama Islam untuk menggabungkan dua pendekatan ini. *Pertama* yaitu komunikasikan harapan yang tinggi untuk semua siswa. Langkah yang dilakukan yaitu menetapkan niat belajar yang jelas dan kemudian menciptakan kegiatan yang membantu siswa memantau dan merefleksikan keinginan mereka menuju pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Memberi tahu setiap siswa bahwa guru mengharapkan mereka untuk terlibat dalam kinerja tingkat tinggi dan guru akan mendukung mereka untuk upayanya. Ciptakan

kondisi yang mengkomunikasikan rasa hormat yang tulus kepada siswa dan keyakinan pada kemampuan dan kapasitas mereka.

Kedua, ciptakan peluang bagi guru dan siswa untuk mengeksplorasi nilai dan keyakinan secara terbuka. Sebelum mengajar siswa, guru perlu memahami sistem hukuman struktural yang beroperasi pada tingkat masyarakat, dan menganalisis dan merefleksikan bias dan prasangka guru sendiri. Guru harus mengenali keanggotaan mereka sendiri dalam berbagai kelompok dalam masyarakat dan mengakui manfaat dan kerugian dari keanggotaan tersebut. Berikan kesempatan yang sering bagi siswa untuk menyelidiki dan menguji asumsi, bias, kepercayaan, dan prakonsepsi mereka sendiri. Mereka harus terus menilai dan menyesuaikan pandangan dunia mereka sendiri yang berkembang ketika mereka mengembangkan pemahaman dan pengalaman yang lebih dalam (Shelley Taylor; Shelley Taylor; William T; Welch; Heejung S; Kim; Heejung S; Kim; David K Sherman, 2007). Bantu siswa memperjelas nilai-nilai mereka sendiri, memahami nilai-nilai orang lain, dan menyelidiki nilai-nilai yang mendasari pandangan dunia yang berkelanjutan. Guru perlu membantu mereka menyelidiki bidang-bidang di mana nilai-nilai mereka sendiri bertepatan atau bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang lebih luas atau nilai-nilai yang terkait dengan menciptakan ruang yang aman dan adil untuk sekarang dan di masa depan. Menciptakan lingkungan yang aman di mana siswa dapat mengeksplorasi dan mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan ras, kelas, jenis kelamin, identitas, peluang, dan hak istimewa secara terbuka (Indriya, 2022). Guru dapat menciptakan pengaturan semacam ini dengan terlebih dahulu mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sebagai makhluk budaya yang kritis. Menciptakan lingkungan yang aman membutuhkan penetapan norma, prosedur, dan struktur yang jelas yang mengkomunikasikan nilai-nilai inklusi dan harapan niat positif. Ketika lingkungan yang aman dan mendukung telah dibuat, kemungkinan besar siswa akan dapat mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menyelidiki nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-nilai orang lain (Nolet, 2017).

Ketiga, gunakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Belajarlah untuk menggunakan strategi yang sangat kolaboratif, aktif, partisipatif, dan berpusat pada peserta didik dan yang mendukung siswa dalam eksplorasi masalah dunia nyata. Pembelajaran semacam ini dapat dipromosikan dengan berbagai pendekatan yang berpusat pada pembelajar di mana peran guru bergeser dari pengantar konten ke fasilitator pembelajaran, dan peserta didik memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Pengajaran yang berpusat pada peserta didik mempromosikan pembelajaran untuk pemahaman melalui kolaborasi dan refleksi. Beberapa contoh strategi yang berpusat pada peserta didik termasuk pembelajaran kelompok kecil kolaboratif, pembelajaran berbasis inkuiri, pembelajaran pengalaman, pembelajaran layanan, dan pembelajaran berbasis tempat.

Keempat yaitu fokus pada masalah dunia nyata yang bermakna yang memiliki relevansi dalam kehidupan anak-anak. Libatkan siswa dalam pembelajaran yang terjadi di luar lingkungan kelas dengan sengaja melibatkan masyarakat. Bantu siswa membuat koneksi kurikuler dari peristiwa yang terjadi di komunitas dan kehidupan mereka sendiri. Imbahlah siswa untuk menyelidiki komunitas, keluarga, dan budaya mereka serta menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka untuk melihat bahwa situasi dan cara mereka sendiri untuk mengetahui sama relevan dan bermakna seperti yang terjadi di komunitas lain atau di seluruh dunia. Imbahlah siswa untuk mengeksplorasi aspek budaya dan identitas mereka sendiri dan untuk menemukan cara untuk menerapkan pengetahuan

berbasis budaya untuk tantangan dunia nyata. Imbaulah siswa untuk menjelajahi sejarah pribadi dan keluarga sebagai bagian normal dari penyelidikan yang lebih dalam terhadap identitas mereka sendiri. Dukung siswa untuk merasa nyaman dengan kompleksitas dan ambiguitas dalam berbagai konteks. Misalnya, membantu siswa mengenali dan merangkul kompleksitas dalam konteks identitas, budaya, dan keanggotaan dalam kelompok yang berbeda dapat membimbing mereka untuk melihat bahwa kehidupan penuh dengan ambiguitas dan kompleksitas yang tidak memungkinkan mereka untuk mendeskripsikan atau menyelesaikannya dengan mudah. Salah satu cara guru dapat membantu siswa menjadi lebih baik dalam menghadapi tantangan yang tidak cocok dengan solusi yang rapi adalah dengan memasukkan contoh dunia nyata dari masalah dalam kurikulum dan kemudian memodelkan pemikiran dan pengambilan keputusan yang terlibat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.

Kelima, libatkan siswa dalam pemikiran kritis dan pemikiran reflektif. Berikan kesempatan reguler dan sistematis bagi siswa untuk mempraktikkan komponen pemikiran kritis dalam berbagai konteks, termasuk area konten tradisional serta konteks yang lebih luas terkait dengan tantangan keberlanjutan. Jadikan berpikir kritis sebagai bagian rutin dari iklim kelas sehingga siswa melihat pemikiran kritis sebagai praktik sehari-hari. Tetapkan rutinitas dan protokol yang membantu siswa menantang dan mengklarifikasi asumsi, membantah masalah dengan bukti yang mendukung, merefleksikan bias mereka sendiri, tidak setuju dengan hormat dan konstruktif, dan bergulat dengan dilema yang menantang. Modelkan pemikiran kritis dan buat pemikiran guru terlihat oleh siswa dalam praktik profesional harian. Bantu siswa juga melihat betapa pemikiran kritis merupakan komponen pandangan dunia keberlanjutan. Pelajari cara mengajukan pertanyaan yang menantang dan membangkitkan pikiran yang menjadi model pemikiran kritis untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih berpikir kritis. Berikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung bagi siswa ketika mereka berlatih berpikir kritis dalam berbagai konteks.

Keenam, terakhi, bantu siswa mengembangkan rasa keefektifan dan agensi mereka. Agensi mengacu pada kemampuan individu untuk membuat pilihan dan bertindak secara efektif untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Untuk menerapkan pandangan dunia keberlanjutan, siswa perlu tahu apa yang perlu dilakukan, tahu bagaimana melakukannya, dan memiliki kemampuan untuk bertindak dengan cara yang memiliki dampak yang berarti. Kepercayaan pada kapasitas sendiri untuk mengatur dan melaksanakan Tindakan sering disebut sebagai *self-efficacy* (Shelley Taylor; Shelley; Taylor; William T; Welch; Heejung S; Kim; Heejung S; Kim; David K Sherman, 2007). Orang-orang mengembangkan *self-efficacy* dengan memiliki kesempatan untuk belajar bagaimana melakukan tugas dengan sukses; dengan melihat orang lain berhasil menyelesaikan tugas; dengan menerima pesan positif, dorongan, dan ceramah; dan dengan mempelajari cara meminimalkan stres dan meningkatkan suasana hati seseorang ketika menghadapi tugas yang sulit atau menantang.

Namun, pendidikan untuk keberlanjutan memberdayakan kaum muda untuk mengatasi ketidakadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menciptakan penderitaan di seluruh dunia saat ini. Dengan menerapkan strategi yang membantu siswa untuk mengembangkan kompetensi budaya dan pandangan dunia keberlanjutan, guru dapat membantu mereka menemukan solusi nyata untuk tantangan kompleks yang mereka hadapi saat ini dan yang akan mereka hadapi di masa depan.

Jika membahas tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, memang tidak bisa terlepas dari kajian sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ini karena awal munculnya pendidikan Islam di Indonesia terwujud dengan adanya praktek penyebaran agama Islam itu sendiri. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia disebabkan dua faktor yang cukup Dominan. Faktor tersebut yaitu: *Pertama*, karena posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis pelayaran Internasional, khususnya rute perdagangan yang dari jurusan Timur Tengah menuju China daratan. *Kedua*, Indonesia memiliki kesuburan tanah sehingga daratannya banyak menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup bagi bangsa lain, misalnya rempah-rempah (Muktarom, 1997).

1. Pendidikan Islam Indonesia Modern

Indonesia sebagai negara yang multi etnik dan agama yang memiliki keaneka ragaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadatnya memiliki berbagai bentuk Institusi Pendidikan. Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Institusi Pendidikan Islam dikelompokkan menjadi tiga Kelompok, yaitu Pendidikan Islam Formal, Pendidikan Islam Non-Formal, dan Pendidikan Islam In-Formal (Government Republic of Indonesia, n.d.).

a. Pendidikan Formal

Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan dengan jelas bahwa “Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Ramayulis, 2006). Lembaga pendidikan sekolah, yaitu bila dalam pendidikan tersebut diadakan ditempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan dalam kurun waktu tertentu, berlangsung mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi.

Haidar Nawawi mengelompokkan lembaga pendidikan sekolah kepada lembaga pendidikan yang kegiatan pendidikannya diselenggarakan secara sengaja, berencana, sistematis dalam rangka membantu anak dalam mengembangkan potensinya agar mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi.

Di Indonesia yang termasuk kategori lembaga pendidikan formal adalah sebagai berikut:

- 1) Raudhatul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal, atau nama lain sesuai dengan pendiriannya
- 2) Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Islam (SDI)
- 3) Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI), atau nama lain yang setingkat dengan lembaga ini
- 4) Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) atau nama lain yang setingkat dengan lembaga ini
- 5) Perguruan Tinggi Islam antara lain adalah sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Universitas Islam Negeri (UIN) atau lembaga sejenis milik Yayasan atau organisasi keIslaman

b. Pendidikan Non Formal

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ramayulis mengartikan pendidikan Non-Formal adalah lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa pendidikan Islam non-formal adalah

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan tanpa mengikuti peraturan yang baku dari pemerintah.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan formal, nonformal, dan informal. Di dalam PP No. 55 tahun 2007 menyebut majelis taklim, pengajian kitab, pendidikan Alquran dan diniyah taklimiyah sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam.

Beberapa diantara pendidikan Islam yang tidak formal diselenggarakan oleh masyarakat dan masih tetap eksis hingga sekarang adalah sebagai berikut :

- 1) Masjid, Mushalla, Langgar, Surau dan Rangkang
 - 2) Madrasah Diniyah
 - 3) Majelis Ta'lim, TPQ, Taman Pendidikan Seni al-Qur'an, Jama'ah wirid
 - 4) Kursus-kursus KeIslaman
 - 5) Badan-badan Pembinaan Rohani
 - 6) Badan-Badan Konsultasi keagamaan
3. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya (Indriya, 2020). Pengertian ini berarti menegaskan bahwa yang masuk dalam kategori pendidid Islam in formal adalah pendidika Islam yang diberikan oleh orang tua kepada keluarganya dan juga pendidikan Islam dilingkuungan masyarakat seperti majlis ta'lim yang ada di masjid-masjid atau mushola.

Praktek pendidikan Islam informal tidak terikat dengan penjenjangan, waktu, atau muatan kuirkulurnya. Pendidikan berjalan secara alami dan materi pendidikannya bersifat kondisional dan sesuai dengan kebutuhan tanpa ada program waktu dan evaluasi.

2. Lembaga Pendidikan Islam

Jika ditelaah secara etimologi, pengertian lembaga adalah acuan, asal sesuatu, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, sebuah badan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan aktifitas keilmuan atau melakukan sebuah usaha. Sedangkan pengertian lembaga pendidikan Islam, jika dilihat secara terminology, pengertian lembaga Pendidikan Islam masing-masing pakar mengemukakan pendapatnya. Ada yang memaknai lembaga pendidikan Islam hanya secara fisik dan ada yang memaknainya secara abstrak. Menurut Prof. Dr Ramayulis, Hasan Langgulung, beliau mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat *mujarrad* suatu konsepsi yang terdiri dari Kode-kode, Norma-norma, Ideologi-ideologi dan sebagainya, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, termasuk didalamnya perlengkapan material dan organisasi simbolik. Pendapat Ramayulis Langgulung itulah pendapat yang mengcover keduanya yaitu secara fisik dan Non-fisik, serta cukup menggambarkan tentang realitas lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Di Indonesia ada berbagai bentuk lembaga pendidikan Islam, antara lain pondok pesantren dengan berbagai variannya, sekolah Islam atau Madrasah dengan berbagai jenjang dan tipenya, serta perguruan tinggi dengan berbagai program studi yang dimilikinya.

a. Pondok Pesantren

Secara harfiah pesantren merupakan sebuah bentuk lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia. Jika menilik data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Indonesia, pondok pesantren pertama kali didirikan atau yang tertua di Indonesia adalah

pondok pesantren Jan Tampes II, pondok ini berdiri pada tahun 1062 di Pamekasan Madura Jawa Timur. Sekalipun sebagian kalangan meragukan data ini, namun semua sepakat bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.

Eksistensi Pondok Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, hingga saat ini telah tumbuh dan berkembang sejak dari awal berdiri hingga di era modern seperti saat ini. Jika dilihat dari sejarah perkembangannya Pondok Pesantren masih tetap konsisten menjalankan fungsinya sebagai sebuah lembaga pengajaran ilmu-ilmu agama Islam, sehingga pondok pesantren telah banyak melahirkan ulama, para guru agama, mubaligh, serta tokoh politik.

Pada awalnya pesantren didirikan bertujuan mengembangkan Islam di Indonesia, dan tujuankhususnya, yaitu: *pertama*, sebagai sarana pengkaderan para ulama' sehingga pesantren akhirnya mampu menyebarkan agama di tengah-tengah masyarakat; *kedua*, membentuk jiwa para kaum muslim di Indonesia memiliki moral dan relijius; *ketiga*, *bertujuan* menanamkan kesadaran holistik bahwa belajar agama merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah sebagai bentuk pengabdian kepada tuhan, bukan hanya untuk meraih prestasi kehidupan dunia (Rofiq, Ainur; Ta'atfin, 2005).

Seiring dengan kemajuan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, serta mengantisipasi perkembangan arus informasi secara global, maka pendidikan di pondok pesantren di Indonesia juga mengalami beberapa perubahan guna penyesuaian. Perubahan yang signifikan diantaranya persoalan kurikulum dan metode serta teknik pembelajarannya. Dewasa ini sebuah belajar bukan hanya diposisikan sebagai alat, namun sekaligus sebagai tujuan, karena dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh pesantren sering monoton dengan cara lama, dengan tidak mempertimbangkan strategi, waktu, dan metode yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman (Kholid Fathoni, 2005). Sedangkan, seiring dengan perubahan zaman para siswa (santri) membutuhkan formalitas, seperti Ijazah serta penguasaan bidang keilmuan lainnya selain ilmu agama yang dapat mengantarnya agar mampu mengarungi kehidupan mereka nantinya. Pada era modern seperti saat ini, para santri tidak cukup hanya dibekali dengan nilai agama dan norma moral saja, namun perlu pula dilengkapi dengan keahlian yang relevan dengan dunia kerja saat ini.

b. Sekolah Islam

Sekolah Islam adalah bentuk dari buah perkembangan peradaban pendidikan Islam. Keberadaan Sekolah Islam di Indonesia berawal dari adanya sekelompok masyarakat yang berlatar belakang agama Islam yang memiliki gagasan membuka sekolah dengan sistem sekolah umum modern namun dengan tambahan pelajaran Agama. Pencetus ide utama dalam modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia adalah organisasi keagamaan Islam modern seperti Jami'at Khair, Al-Irsyad, dan Muhammadiyah.

Dalam perjalanan sejarahnya, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Islam ini akhirnya menjadi inspirasi bagi hampir semua organisasi pergerakan Islam, sebut saja Nahdlatul Ulama' (NU) yang dikenal dengan sebutan Maarif yang berdiri tahun 1926 di Jawa timur, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Pertisi), Persatuan Islam (Persis), Al-Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Matalaul Anwar, dan setiap organisasi memiliki corak dan ciri khas masing-masing.

Namun dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari organisasi tersebut menyelenggarakan pendidikan umum namun memasukkan pendidikan dan pengajaran Agama Islam. Dan sebagian mencantumkan nama Islam dibelakangnya, seperti SD Islam, SMP Islam, dan SMA Islam. Banyak organisasi keagamaan mencantumkan nama organisasi penyelenggaranya seperti SMP Maarif yang dimiliki organisasi Nahdatul

Ulama, SMP Muhammadiyah yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah, SMA Al-Irsyad dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit yang menggunakan nama arab, misalnya SD Al-Falah, SMP Futuhiyah. Dan belakangan ini muncul nama SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) SMPIT (Sekolah Menengah Pertama Islam terpadu). Bahkan terakhir di era modern ini bermunculan sekolah Islam dengan model *fullday* atau *Boarding Scholl*.

c. Perguruan Tinggi Islam

Perguruan tinggi Islam di Indonesia sudah ada sejak zaman colonial belanda. Para pemikir dan tokoh islammasaitu beranggapan bahwa, kebutuhan Pendidikan tinggi Islam bagi umat sudah sangat mendesak untuk didirikan, karena hal ini bertujuan untuk menciptakan para pakar dalam bidang agama Islam serta meningkatkan intelektualisme umat Islam. Akhirnya pada tahun 1940, keinginan tersebut dapat terealisasikan, berada di tanah Minangkabau pertama kali telah didirikannya sekolah Tinggi yang diprakarsai oleh organisasi persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) di Padang yang resmi pendiriannya pada tanggal 9 Desember 1940 (Yunus, 1992). Dan ini Sekolah Tinggi Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia yang merupakan cikal bakal Sekolah Tinggi Islam yang lain ditanah air.

Dewasa ini Pendidikan Tiggi Islam (PTI) di Indonesia baik yang berstatus negeri milik pemerintah maupun yang berstatus swasta yang didirikan oleh masyarakat terus menunjukkan berkembangnya, hal ini dapat dilihat dari beragamnya program studi dan jurusan yang dimiliki. Saat ini Pergurun Tinggi Islam Swasta yang didirikan oleh masyarakat berjumlah 272 perguruan tinggi Islam dan Perguruan Tinggi Islam Negeri milik pemerintah berjumlah 52 sekolah tinggi Islam.

E. KESIMPULAN

Menelaah pendidikan Islam di Indonesia terbukti telah merubah semua aspek kehidupan lebih Religius dan Berbudaya. Dari Penelitian ini *pertama*, menemukan bahwa pendidikan Islam sangat berpengaruh kepada perkembangan Islam di Indonesia, *kedua*, Ulama, ajaran sangat berkontribusi terhadap perkembangan Islam di negara, *ketiga*, kondisi Sosial Budaya dan Politik negara memegang peran sangat penting dalam mengembangkan Islam di setiap negara. Termasuk bagaimana kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia dalam mendukung Sustainable Developmenet Goals.

DAFTAR PUSTAKA

- abd Qadir Muslim; Gede Sedana Suci; Muhammad Rizki. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Di Jepang, Finlandia, China Dan Indonesia Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Darma Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar*, 6(2). [Http://Ejournal.Ihdn.Ac.Id/Index.Php/Aw](http://Ejournal.Ihdn.Ac.Id/Index.Php/Aw)
- Abrista Devi; Indriya, I. I. W. H. J. (2022). How Does Islamic Fashion Industry Optimize The Use Of Fintech To Achieve Sustainable Development Goals In Industrial Revolution 5.0 Era?. *Aicis 2022*.
- Abudin Nata. (2005). *Filsafat Pendidikan Islam* (Cetakan 3). Gema Media Pratama.
- Achmad Nur Fauzi, D. R. (N.D.). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.
- Afrilia, Hilda; Indriya, I. (2020). *Internalisasi Pendidikan Karakter Islami Anak Ditengah*. 6(2), 46–52.
- Alvares-Otero, J., & De Lazaro Y Torres, M. . (2018). Education In Sustainable Development Goals Using The Spatial Data Infrastructures And The Tpack Model. *Education Sciences*, 8(4), 1–14. <https://doi.org/10.3390/educsci8040171>
- Boeren, E. (2019). Understanding Sustainable Development Goal (Sdg) 4 On “Quality Education” From Micro, Meso And Macro Perspectives. *International Review Of Education*, 65(2), 277–294. <https://doi.org/10.1007/S11159-019-09772-7>
- Charifudin. (2016). Potensi Belajar Dalam Al-Qu ’ Ran (Telaah Surat An Nahl : 78). *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 05(10), 1411–1429. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/Ei.V5i10.10>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Ri. (2003). *Uu Ri Nomor 20 Tahun 2003 Pasal (1) Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Government Republic Of Indonesia. (N.D.). *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat Pasal 12*.
- Hafidhuddin, D. (2016). *Pendidikan Karakter*.
- Husaini, Adian. (2018). Konsep Pendidikan Islam Dalam Pandangan Adian Husaini. *Journal Of Research And Thought Of Islamic Civilitation*,.
- Indriya. (N.D.). *Analisis Penentuan Faktor Dominan Dalam Penyusunan Kurikulum Pendidikan Busana Muslim Dengan Menggunakan Metode Analytic Network Process*.
- Indriya. (2019). *Analisis Penentuan Faktor Dominan Dalam Penyusunan Kurikulum Pendidikan Busana Muslim Dengan Menggunakan Metode Analytic Network Process*.

- Indriya. (2020). *Menteladani Nabi Ibrahim Alaihissalam Menghidupkan Tarbiyah Ilahiyah Keluarga Menuju Era New Normal*.
- Indriya, I. A. F. P. F. F. M. S. A. S. N. (2022). *Hybrid Learning Model Of Ibn Khaldun And Vygotsky Learning In Improving Management To Education In The Digital Society Era (Aliyah Islamic Boarding Sshool Darul Muttaqien Parung In Bogor Indonesia Regency)*.
- Jie, N. D. (2016). *Towards A Framework Of Education Policy Analysis*.
[https://Scholar.Google.Com/Scholar?Hl=En&As_Sdt=0%2c5&Q=Jie%2c+N.+D.%2c+2016.+Towards+A+Framework+Of+Education+Policy+Analysis.+S.L.%3athe+Head+Foundation.&Btng=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2c5&q=jie%2c+n.+d.%2c+2016.+towards+a+framework+of+education+policy+analysis.+s.l.%3athe+head+foundation.&btnq=)
- Khaldun, I. (2001). *Mukaddimah*.
- Kholid Fathoni, M. (2005). *Pendidikan Islam Dan Pendidikan Nasional [Paradigma Baru]*.
- Lestari, D. (2016). Analisis International Convention On The Rights Of The Child (Crc) Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia. *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, 4(3).
- Muktarom, Z. (1997). *Sejarah Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Nata, A. (2003). *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Nolet, V. (2017). Cultural Competence And A Sustainability Worldview. *Quality Education*., 53(4), 162–167. <https://doi.org/10.1080/00228958.2017.1369276>
- Ramayulis. (2006). *Ilmu Pendidikanm Islam*. Kalam Mulia.
- Rofiq, Ainur; Ta'atfin, A. (2005). *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*,. Listafariska.
- Rusmana, I. (2012). *Teladan Tarbiyah Ilahiyah Keluarga Nabi*.
- Shelley Taylorshelley; Taylorwilliam T; Welchheejung S; Kimheejung S ; Kimdavid K Sherman. (2007). Cultural Differences In The Impact Of Social Support On Psychological And Biological Stress Responses. *Psychological Science*, 18(9), 831–837. <https://doi.org/10.1111/J.1467-9280.2007.01987.X> Sourcepubmed
- Sholichah, A. S. (2018). Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Qur'an, Edukasi Islam. *Pendidikan Islam*, 7(1).
- Sritama, W. (2019). Konsep Dasar Dan Teori Pendidikan Agama Islam. *Inovatif*, 5(1).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Tafsir, A. (2013). *Ilmu Pendidikan Islam*.

W.J.S.Poerwadaminta. (2007). *amus Umum Bahasa Indonesia*,.

William, C. (2007). Research methods. *Journal of Business & Economic Research*, 5(3), 65–72.

Yunus, M. (1992). *Sejarah Pendidikan di Indonesia*,. Mutiara Sumberwidya.